

**KINERJA ANGGARAN KEGIATAN OPERASI GABUNGAN
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**MIA LESTARI
NIM. 07011181621027**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
KINERJA ANGGARAN KEGIATAN OPERASI GABUNGAN
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

MIA LESTARI
07011181621027

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Pembimbing II

Dwi Mirani, S.Ip., M.Si
NIP. 198106082008122002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Kinerja Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 09 Juli 2020.

Indralaya, 09 Juli 2020

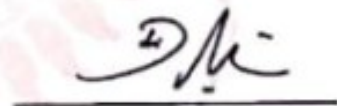
Ketua

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

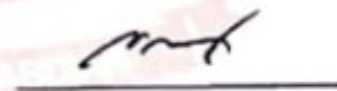


Anggota

1. Dwi Mirani, S.Ip., M.Si
NIP. 198106082008122002



2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Motto:

“Kalau kamu tidak lelah, berarti kamu sedang tidak memperjuangkan apapun dalam hidupmu”

Berkat Ridho Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada:

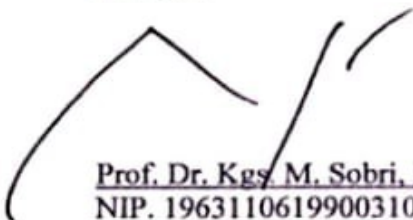
1. Kedua orangtua, Ayahku tercinta Saleh dan Ibuku Neti Mutiara
2. Adik-adikku tersayang, Meria Billah Ittaqi dan Ahmad Zainudin Fikri
3. Sahabat seperjuanganku
4. Almamaterku Universitas Sriwijaya
5. Kamu

ABSTRACT

This research's background is because of the decrease budget ceiling in the year 2018 and the difference budget in the year 2018 at the combined immigration surveillance operation at the TPI Immigration Office Class I of Palembang City, even though the activity is on a large-scale activity because the activity is being cooperates with four district governments, two city governments and with the officials security such as the Indonesian National Army (TNI) and the Police. This reserach aims to determine the Budget Performance of the Combined Immigration Oversight Operation Activities. The method that being used is the descriptive qualitative method. The research on the budget performance uses the theory of the performance measurement system based on the budget analysis from Muhammad Mahsun that based on three dimensions, namely as performance measurement, planning and implementation. The results showed that the budget performance of the combined immigration control operational activities was quite good but not really optimal, because it seen in the dimensions of the performance measurement, the budget for the combined immigration supervision operational activities at the TPI Palembang Immigration Office Class I was included in the underspending category with a fairly budget efficiency level, at the planning of the activities and the budget is in the accordance with the guidelines in the regulations and the implementation of activities is in the accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) but the dimensions of budget execution are not yet optimal because there are two expenditure posts that are not absorbed really properly. The recommendation that being recommended in this research is the TPI Immigration Office Class I of Palembang advised to do minimize the expenditure budget which would not be used so that the nominal budget difference is not too large.


Keywords: *Performance, Budget, Combined Immigration Oversight Operations*

Advisor I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, July 2020
Chairman of The Public Administration Departement
Faculty of Soeial and Political Science
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

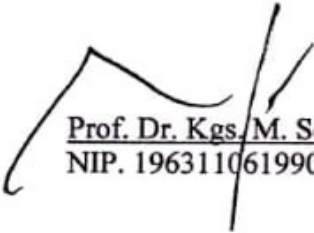
ABSTRAK


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan pagu anggaran tahun 2018 dan adanya selisih anggaran tahun 2018 pada kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, padahal kegiatan tersebut merupakan kegiatan berskala besar karena bekerjasama dengan empat pemerintah kabupaten, dua pemerintahan kota serta dengan aparat keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penelitian mengenai kinerja anggaran ini menggunakan teori sistem pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran dari Muhammad Mahsun berdasarkan tiga dimensi, yakni pengukuran kinerja, perencanaan dan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian sudah cukup baik namun belum optimal, terlihat pada dimensi pengukuran kinerja, anggaran kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang termasuk kedalam kategori *underspending* dengan tingkat efisiensi anggaran terbilang cukup efisien, pada perencanaan kegiatan dan anggaran sudah sesuai dengan pedoman dalam peraturan, dan pada pelaksanaan kegiatan sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) namun pada dimensi pelaksanaan anggaran belum optimal karena terdapat dua pos belanja yang tidak terserap dengan semestinya. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang disarankan untuk meminimalkan anggaran pos belanja yang sekiranya tidak akan terpakai agar nominal selisih anggaran tidak terlalu besar.

Kata Kunci: Kinerja, Anggaran, Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001


Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, Juli 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah dapat diberi kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KINERJA ANGGARAN KEGIATAN OPERASI GABUNGAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sholawat serta salam tak lupa penulis tuturkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan yang penulis hadapi, namun akhirnya dapat dilalui berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya Ayahanda Saleh dan Ibunda Neti Mutiara yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik Meria Billah Ittaqi dan Ahmad Zainudin Fikri yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran.
4. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajaran sekaligus dosen pembimbing I.
5. Ibu Dwi Mirani, S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bantuan baik moril dan spiritual sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Hasrullah, S.Sos selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
8. Bapak Dedi Sodikin, S.H selaku Kepala Urusan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang telah memberikan masukan, bantuan dan bimbingan terhadap proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Nur S Diah, SS selaku Analisis Keimigrasian Muda Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang telah memberikan masukan, bantuan dan bimbingan terhadap proses penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan kata penulis mohon maaf dan menerima saran serta kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Indralaya, Juli 2020
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i>.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Keuangan Negara.....	9

2. Konsep Kinerja Anggaran.....	11
B. Teori Pengukuran Kinerja Keuangan.....	18
1. Pengukuran Kinerja Berdasarkan <i>Value For Money</i>	18
2. Pengukuran Kinerja Berdasarkan <i>Balanced Scorecard</i>	20
3. Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran.....	21
C. Teori yang digunakan dalam Penelitian.....	22
D. Penelitian Terdahulu.....	25
E. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Definisi Konsep.....	28
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Unit Analisis Data.....	29
E. Informan Penelitian.....	30
F. Jenis dan Sumber Data.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
I. Jadwal Penelitian.....	33
J. Sistematika Penulisan.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	36
1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	36

2. Letak Geografis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	38
3. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang.....	38
4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	39
5. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	40
6. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang.....	41
7. Tugas dan Fungsi Bidang Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang.....	42
B. Hasil dan Pembahasan.....	48
1. Pengukuran Kinerja.....	49
2. Perencanaan.....	54
3. Pelaksanaan.....	63
4. Hasil Temuan.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pagu Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018.....	4
2. Realisasi Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian.....	5
3. Realisasi dan Selisih Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan.....	7
4. Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran.....	22
5. Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Analisis Anggaran.....	23
6. Penelitian Terdahulu.....	25
7. Fokus Penelitian.....	29
8. Jadwal Penelitian.....	34
9. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	41
10. Pegawai Berdasarkan Golongan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang.....	41
11. Perhitungan Analisis Varians Anggaran.....	50
12. Analisis Rasio Efisiensi.....	52
13. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	53
14. Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018.....	58
15. Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018.....	60
16. Realisasi Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017 dan 2018.....	61
17. Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018.....	67
18. Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	68
19. Hasil Temuan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Pagu dan Realisasi Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017 dan 2018.....	5
2. Kerangka Berpikir.....	27
3. Stuktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	42
4. Rapat Penyusunan RKA.....	57
5. Standar Operasional Prosedur Operasi Gabungan Tim Pora.....	64
6. Standar Operasional Prosedur.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi
2. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
4. Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
7. Kartu Revisi Seminar Proposal
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
21. Dokumentasi

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bhumi Pura Purna Wibawa	: Penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
GASB	: <i>Governmental Accounting Standards Board</i>
GPRA	: <i>Government Performance Result Act</i>
Inteldakim	: Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Kanim	: Kantor Imigrasi
NCGA	: <i>National Committee on Governmental Accounting</i>
RKA	: Rencana kerja Anggaran
RKAP	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TPI	: Tempat Pelayanan Imigrasi
<i>Overspending</i>	: Selisih yang terjadi jika pengeluaran aktual lebih besar jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran
PORA	: Pengawasan Orang Asing
Pagu Anggaran	: Target Anggaran
<i>Underspending</i>	: Selisih yang terjadi jika pengeluaran aktual lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran
WNA	: Warga Negara Asing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan negara merupakan hal yang vital karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, selaras dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan langkah konkrit yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti dengan pembuatan program strategis. Pelaksanaan program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah membutuhkan biaya yang nominalnya disesuaikan dengan skala program-program yang dicanangkan. Pembiayaan pada program-program pemerintah tersebut dikenal dengan anggaran.

Anggaran keuangan sebagai hal pokok dalam suatu organisasi tak akan luput dari perhatian sebab anggaran merupakan salah satu komponen yang menunjang keberhasilan suatu program kerja instansi pemerintah. Menurut Munandar (2010:1) anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas organisasi yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Secara umum anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Brilianto (dalam *uangkartal.com*, 2016:1)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, sedangkan menurut Mahsun (2009:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja dapat diketahui jika organisasi memiliki kriteria keberhasilan seperti target-target pencapaian sebagai tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus aspek keuangan, kinerja anggaran merupakan *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk membiayai setiap kegiatan suatu instansi pemerintah. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja anggaran akan bermuara pada optimalnya peran belanja pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mulyani (dalam *Kemenkeu.go.id*, 2017:1).

Salah satu instansi pemerintah yang berorientasi pada sektor publik ialah Kantor Imigrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi menjelaskan bahwa kantor imigrasi adalah unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan, pada wilayah Sumatera Selatan terdapat dua kantor imigrasi yakni Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang cangkupan wilayah kerjanya ialah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki salah satu bagian yaitu seksi Inteldakim (Intelijendan Penindakan Keimigrasian) dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kerjasama intelijen dan pengawasan keimigrasian;

2. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
3. Penyajian informasi produk intelijen;
4. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
5. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
6. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
7. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Salah satu program kerja guna mendukung berjalannya fungsi seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) yaitu kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian, kegiatan ini bekerjasama dengan instansi terkait seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, serta dengan pemerintah kabupaten atau kota dibawah naungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yakni empat Pemerintah Kabupaten serta dua Pemerintah Kota. Kesatuan pengawasan tersebut disebut dengan Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 69. Setelah pembentukan Tim Pora maka akan diadakan rapat gabungan, dalam rapat tersebut akan disepakati terkait daerah ataupun tempat yang akan menjadi target operasi gabungan pengawasan keimigrasian, dengan adanya sinergisitas antar instansi diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan optimal, dan tepat sasaran.

Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian bertujuan untuk mengawasi dan menindak warga negara asing (WNA) masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin tinggal atau menyalahgunakan visa kunjungan yang seharusnya untuk berwisata atau liburan namun digunakan untuk bekerja disuatu perusahaan, dan mencegah Warga Negara asing (WNA) melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan berlaku diIndonesia seperti membuat keresahan dengan membawa barang-barang berbahaya dan merusak

generasi bangsa dengan menyuplai obat-obatan terlarang ke Indonesia. Guna merealisasikan target kegiatan yang sudah ditetapkan, diperlukan kinerja anggaran yang baik. Setiap tahunnya kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Berikut pagu anggaran kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian tahun 2018, yakni:

Tabel 1. Pagu Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)
Belanja Bahan Persiapan Rencana Kegiatan	800.000
Belanja Barang Non Operasional Penguatan Bahan Keterangan	13.430.000
Beban Sewa Penguatan Bahan Keterangan	500.000
Belanja Barang Non Operasional Pelaksanaan Pengawasan	2.760.000
Beban Sewa Pelaksanaan Pengawasan	11.500.000
Belanja Bahan Penyusunan Laporan dan Evaluasi	800.000
Belanja Barang Non Operasional Penyusunan Laporan dan Evaluasi	3.310.000
Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018	33.100.000

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat pagu anggaran kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian tahun 2018 yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran yang diberikan harus dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebaik mungkin sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang-undang, untuk melihat penggunaan anggarannya, berikut data laporan realisasi anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017 dan 2018, yakni:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017 dan 2018

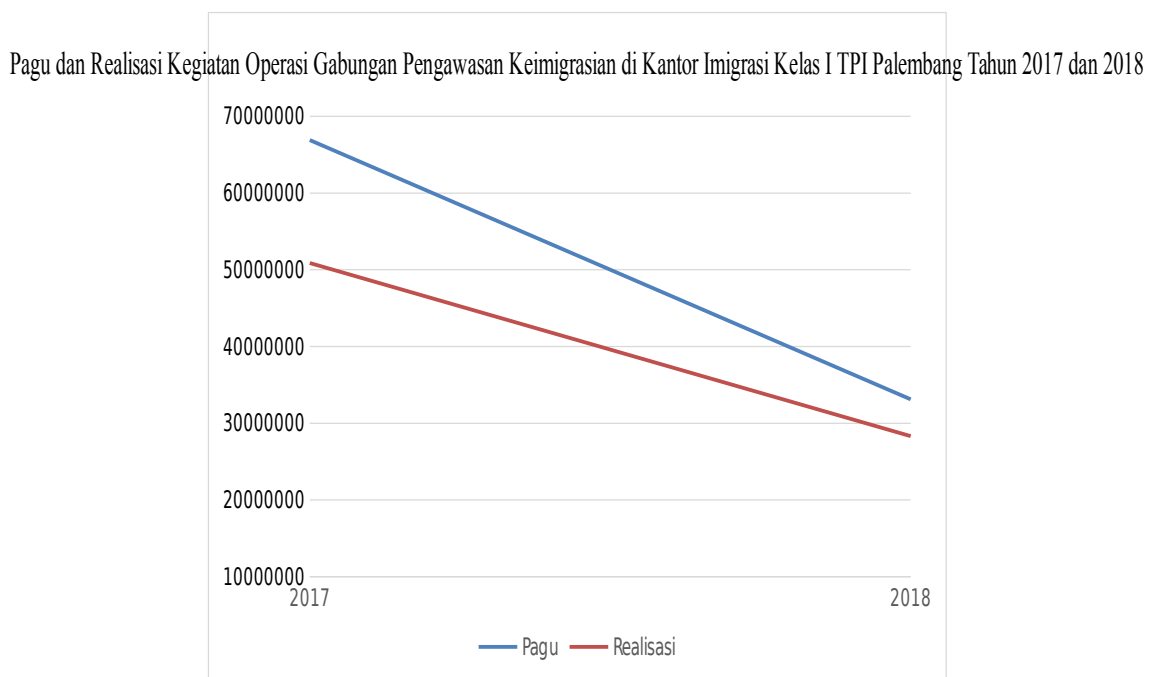
Uraian	Tahun Anggaran
---------------	-----------------------

	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Pagu	66.920.000	33.100.000
Realisasi	50.873.500	28.305.750

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa pagu anggaran untuk kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dari tahun 2017 pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp66.920.000 dan realisasinya Rp50.873.500 sedangkan Tahun 2018 pagu anggaran yang diberikan untuk menjalankan kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebesar Rp33.100.000 dan realisasinya Rp28.305.750.

Anggaran kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2017 dan 2018 secara grafik dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik Pagu dan Realisasi Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017 dan 2018

Sumber : Diolah penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan gambar 1 grafik garis pagu dan realisasi kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017 dan 2018 diatas, terdapat beberapa permasalahan yang mencuat, sebagai berikut:

1. Penurunan pagu anggaran padahal kegiatan berskala besar

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran (garis biru) yang diberikan untuk menjalankan kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian tahun 2018 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mengalami penurunan. Tahun 2017 pagu anggaran kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebesar Rp66.920.000 dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp33.100.000. Penurunan pagu anggaran ini mengalami penurunan secara drastis sebesar 49%, padahal kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian merupakan kegiatan berskala besar pada proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan banyak biaya seperti mencari dan mengumpulkan data-data Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian, membiayai akomodasi masing-masing perwakilan instansi yang tergabung dalam Tim Pora saat hendak akan melakukan rapat dan operasi, membayar honor serta pembiayaan saat melakukan operasi gabungan ke lapangan serta kebutuhan lainnya.

2. Selisih Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018

Kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian ialah kegiatan yang berskala besar karena bekerjasama dengan empat pemerintah kabupaten, dua pemerintah kota serta aparat keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Berikut tabel realisasi anggaran kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian tahun 2018:

Tabel 3. Realisasi dan Selisih Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018

Uraian	Tahun Anggaran 2018 (Rp)
Pagu	33.100.000
Realisasi	28.305.750
Selisih	4.794.250

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan gambar 1 diatas, bahwa grafik garis antara titik pagu anggaran dan realisasi tahun 2018 tidak bertemu, sehingga pagu anggaran yang diberikan untuk menjalankan kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki sisa anggaran yang tidak habis dipakai untuk menjalankan kegiatan tersebut. Sisa anggaran tahun 2018 sebanyak Rp4.794.250 padahal pada proses perancangan anggaran telah diberikan waktu untuk menganalisa dan mempertimbangkan kebutuhan instansi melalui pembiayaan program atau kegiatan dengan diadakannya rapat setiap seksi, kejelian dan pemikiran kritis dalam menganalisa anggaran yang hendak dibuat sangat berpengaruh terhadap target yang telah ditetapkan. Anggaran harus mencapai target-target atau tujuan demi kepentingan publik (Karianga, 2015:260).

Penelitian ini penting dilakukan karena anggaran merupakan hal vital dalam suatu organisasi bahkan sebagai komponen yang menunjang keberhasilan suatu program kerja instansi pemerintah, dan tingkat urgensitas yang tinggi karena menyangkut keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti sesanti imigrasi sendiri yakni *Bhumi Pura Purna Wibawa* yang berarti Penjaga Pintu Gerbang Negara yang Berwibawa. Hal ini diperlukan analisis lebih mendalam terkait masalah tersebut. Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: Bagaimana Kinerja Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah: mengetahui Kinerja Anggaran Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik terutama dalam bidang Keuangan Negara dan Fiskal serta sebagai bahan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitiannya sehingga lebih banyak lagi permasalahan kompleks yang dapat ditemukan pemecahan masalahnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi bagian urusan Keuangan dan seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang selaku pengguna anggaran kegiatan operasi gabungan pengawasan keimigrasian, agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam mengelola anggaran kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfatih, A. 2014. *Metodologi Penelitian*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Anggraini, Yunita dan Hendra, Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta; Pt.Rineka Cipta
- As'ad. 1991. *Psikologi Industri Edisi Revisi*. Yogyakarta; Liberty
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis dan Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada
- Cresswell, John. 2010. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Dessler, Garry. 1992. *Manajemen SDM, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta; Prenhallindo.
- Dunn, William, N.. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Herlinda. Et. al. 2010. *Metodologi Penelitian*. Palembang; Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka.
- Karianga. Hendra. 2015. *Politik Hukum dan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta; Kencana.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahsun, Mohammad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; Penerbit Andi
- Munandar, M. 2010. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta: BPFE
- Nordiawan, Dedi dan Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Pananrangi, Andi, R.. dan murlinah. 2017. *Etika Birokrat*. Jakarta: CV Sah Media

- Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. 2019. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
- Yuliani, Irma. 2019. *Pengaruh Belanja dan Investasi terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Ponorogo; Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sucipto. 2003. *Penilaian Kinerja Keuangan*. FE Universitas Sumatera Utara
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Suparmini. 2013. *Masyarakat Desa dan Kota*. Yogyakarta.
- Sukarno, Makmuri. 2010. *Masalah konstitusi dan pengelolaan anggaran pendidikan 20% dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia*. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretaris Jenderal DPR RI; Jakarta
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. BPFEE; Yogyakarta
- Tjandra, Riawan. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo; Jakarta

Peraturan-peraturan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Menteri Dalam Negeri, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2060. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1490, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216, Presiden Republik Indonesia, Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Skripsi

Akmal, Muh, I. 2018. *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros)*. Makassar. Universitas Hasanussin.

Auliya, Faqih, P.. 2018. *Kinerja Anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun 2015-2017*. Palembang. Universitas Sriwijaya

Binardini, Ajeng. 2016. *Kinerja Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan*. Indralaya. Universitas Sriwijaya.

Karsiti, Neng. 2016. *Kinerja Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Indralaya. Universitas Sriwijaya

Saputri, Septy, N.. 2019. *Prinsip Money Follow Program dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja di Provinsi Lampung*. Lampung. Universitas Lampung.

Shinta, Kartika, D.. 2019. *Analisis Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017*. Indralaya. Universitas Sriwijaya.

Jurnal

Rampengan dkk. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. *Jurnal berkala Ilmiah Efisiensi (Online)*. Vol 16 No 03 (<file:///C:/Users/acer/Downloads/13530-27015-1-SM.pdf>). Diakses tanggal 23 Januari 2019 Pukul 09.00.

Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Online)*, Vol 2, No 2, (<http://repository.wima.ac.id>) diakses 2 November 2019 pukul 09.30.

Sugianto, Rendi. 2014. Pendekatan dalam Proses Perencanaan dan Penyusunan ABK (*Online*). N0. 2. (<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp56ba3005a3full.pdf>) diakses 23 Januari 2019 pukul 08.37.

Dokumen

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2017

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2018

Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Operasi Gabungan Tim Pora

Internet

Anonim. Kinerja Anggaran. http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kinerja_anggaran.aspx. (Online). Diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 08.34 WIB.

Brilianto, Dio K.. 2016. Anggaran Pemerintah Dihabiskan atau Tidak?. <http://www.uangkartal.com/2016/01/anggaran-pemerintah-dihabiskanatau.html>. (Online). Diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 08.04 WIB.

Erdian 2018. Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dikaitkan dengan *Selective Policy* Keimigrasian Indonesia. <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian> (online). Diakses pada tanggal 19 Februari 2020 Pukul 05.00 WIB.

Kemenkeu.go.id. 2016. Lihatlah Penggunaan Uang Pajak Anda Untuk Apa Saja. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-lihatlah-penggunaan-uang-pajak-anda-untuk-apa-saja/>. (Online). Diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 08.00 WIB.

Solehin, Raden M.. 2018. Anggaran Imigrasi Palembang Minim Pengawasan WNA sulit. <http://www.rmolsumsel.com/read/2018/05/23/94404/1/Anggaran-Imigrasi-Palembang-Minim,-Pengawasan-WNA-Sulit..> (Online). Diakses pada tanggal 16 Februari 2020 pukul 08.20 WIB.